

## BAILEO:

JURNAL SOSIAL HUMANIORA

Volume: I  
Nomor : I, September 2023

FISIP UNIVERSITAS PATTIMURA  
e-ISSN 3026-3468  
p-ISSN 3026-2593  
Naskah diterima:  
31/08/2023;  
direvisi akhir:  
25/09/2023;  
disetujui:  
26/09/2023;

## POLITIK DAN PEREMPUAN: KAJIAN KEGAGALAN CALEG PEREMPUAN PDIP PADA PEMILU LEGISLATIF KOTA AMBON TAHUN 2019

Donita Tondang<sup>1\*</sup>, Amir Kotarumalos<sup>2</sup>, Muhtar<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pattimura, Indonesia

\*Email korespondensi: [donitatondang@gmail.com](mailto:donitatondang@gmail.com)



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license.

### ABSTRACT

*This article discusses the failure of female legislative candidates from the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP) in the 2019 Legislative General Election in Ambon City. This research employs a qualitative approach with an explanatory research method. The research findings reveal that this failure can be attributed to several key factors. First, party recruitment and cadreship have not been optimally executed, leading to inadequate preparation for female candidates. Second, women's political leadership within the party remains minimal, resulting in a lack of support and opportunities for female candidates. Third, the prominence of female figures is also limited, leading to reduced appeal and influence for female candidates. Finally, a low social base diminishes the electability potential of female candidates. The results of this research provide crucial insights into the role of women in politics within a local context and highlight the need for improvements in party recruitment, cadreship, and support for female candidates. Additionally, this study underscores the importance of employing an explanatory qualitative approach in analyzing political and gender-related issues.*

**Keywords:** Women, Politics, Electoral, Legislative

### ABSTRAK

*Artikel ini membahas kegagalan calon legislatif perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Ambon tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian eksplanatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kegagalan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, rekrutmen dan kaderisasi partai belum berjalan secara optimal, sehingga kurangnya persiapan yang memadai bagi calon perempuan. Kedua, kepemimpinan politik kaum perempuan masih minim dalam partai, sehingga kurangnya dukungan dan peluang untuk calon perempuan. Ketiga, faktor ketokohan figur perempuan juga minim, yang mengakibatkan kurangnya daya tarik dan pengaruh bagi calon perempuan. Terakhir, basis sosial yang rendah mengurangi potensi elektabilitas calon perempuan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang peran politik perempuan dalam konteks lokal dan menyoroti perlunya perbaikan dalam rekrutmen, kaderisasi, dan dukungan bagi calon perempuan dalam partai politik. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penerapan pendekatan kualitatif eksplanatif dalam menganalisis permasalahan politik dan gender.*

**Kata kunci:** Perempuan, Politik, Pemilu, Legislatif

## PENDAHULUAN

Pada saat ini perempuan tak hanya menjadi warga negara kelas dua, tapi telah turut mengambil komponen dalam memajukan negara Indonesia. Undang-Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1) berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Wahyudi, 2018; Warjiyati, 2016). Ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan (Kiftiyah, 2019).

Salah satu hak warga negara atas pemerintahan adalah hak berpolitik (Mayrudin et al., 2022). Undang-Undang Nomor 2 Tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu telah mengakomodasi keterwakilan minimal 30% perempuan, yang telah diterapkan sejak Pemilu 2009, dan terus digunakan dalam Pemilu 2014 dan 2019. Meskipun setiap partai telah mengusulkan 30% perempuan dalam Pemilu Legislatif, namun hingga saat ini kuota 30% perempuan di parlemen belum dapat terpenuhi (Bantarani, 2019; Hariyanti et al., 2018).

Pada Pemilu 2009 ada 100 perempuan berhasil duduk di kursi parlemen dengan total keterwakilan 17,86% (Priandi & Roisah, 2019). Pada Pemilu 2014 jumlah anggota DPR RI perempuan mengalami penurunan menjadi 97 orang dan menyumbangkan 17,32% keterwakilan. Pada Pemilu 2019 jumlah keterwakilan perempuan meningkat 21% yakni 118 kursi dari total 575 anggota DPR RI (Jama et al., 2021). Pada tingkat Provinsi dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) keterwakilan perempuan tertinggi pada partai politik tahun 2020 diraih Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah keterwakilannya pada partai politik sebesar 58,82% (Amus et al., 2022).

Provinsi kedua tertinggi yang memiliki keterwakilan Perempuan terbesar pada partai politik adalah Provinsi Maluku Utara (Malut) dengan persentase jumlah keterwakilan pada partai politik mencapai 39,4%. Dari 45 kursi DPRD Provinsi yang tersedia, terdapat 12 perempuan yang berhasil mendudukinya. Jumlah ini menyumbangkan keterwakilan perempuan sebesar 26,6% (Erdayani et al., 2022; Purwanto, 2020).

Terlepas dari itu, pada tingkat Kota, angka 30% keterwakilan juga belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Di Kota Ambon, masih minim perempuan yang menjadi anggota DPRD. Pada periode 2014-2019, total anggota DPRD perempuan hanya 4 orang dengan keterwakilan sebesar 11,42%. Pada periode 2019-2024, anggota DPRD perempuan Kota Ambon meningkat menjadi 6 orang dengan jumlah keterwakilan sebesar 17,14% (Dodanwala & Shrestha, 2021; Purwanto et al., 2020).

Berdasarkan data pada Pilgub Maluku tahun 2018, yang digunakan KPU Kota Ambon untuk pemutakhiran data pemilih pada Pemilu Legislatif 2019, maka jumlah pemilih perempuan 112.160 orang, dan pemilih laki-laki 103.867 orang. Berdasarkan jumlah ini, apabila seluruh perempuan yang memiliki hak pilih di Kota Ambon memutuskan untuk memilih caleg perempuan pada Pemilu Legislatif, maka angka 30% sangat besar kemungkinannya dicapai.

Meski jumlah pemilih perempuan meningkat di setiap Pemilu, namun keterwakilan

perempuan di DPRD Kota Ambon masih rendah. Hal ini dilihat pada data perbandingan anggota DPRD laki-laki dan perempuan di Kota Ambon : 1) hasil Pemilu tahun 2014 jumlah anggota DPRD Kota Ambon laki-laki sebanyak 31 orang. Sedangkan jumlah anggota DPRD Kota Ambon perempuan sebanyak 4 orang, dengan persentase sebanyak 11,42%. 2) hasil Pemilu tahun 2019 jumlah anggota DPRD Kota Ambon laki-laki sebanyak 29 orang. Sedangkan jumlah anggota DPRD Kota Ambon perempuan sebanyak 6 orang, dengan persentase 17,14%.

Pada pemilu legislatif Kota Ambon tahun 2019, partai Golkar memperoleh 22.403 suara. Sehingga Partai Golkar menjadi partai yang meraih suara terbanyak dan sukses mengantarkan 3 caleg perempuannya di DPRD Kota Ambon. Pada urutan kedua, PDIP memperoleh 19.544 suara, tapi besarnya jumlah suara ini tidak diimbangi dengan hasil memuaskan, dimana tidak satupun caleg perempuannya sukses menduduki kursi DPRD Kota Ambon. Diurutan ketiga, Partai Demokrat memperoleh 14.278 suara dan sukses mendapatkan satu parlemen untuk caleg perempuannya. Kemudian partai Gerindra dan juga PKPI berhasil memenangkan satu kursi caleg perempuan.

Berikut ini jumlah caleg perempuan PDIP tahun 2019 berdasarkan daerah pemilihan : Dapil Satu : 3 orang (37,5%), Dapil Dua : 3 orang (37,5%), Dapil Tiga : 3 orang (33,3%), dan Dapil Empat : 4 orang (40%). Kekalahan caleg perempuan PDIP menggambarkan kinerja partai belum maksimal dalam kemenangan. Padahal kesempatan mereka menduduki kursi DPRD terbuka luas. Begitu pula sebaliknya, keberhasilan 6 perempuan terpilih sebagai anggota DPRD tidak luput dari support kinerja masing-masing partai. Dalam prediksi penulis kekalahan seluruh caleg perempuan PDIP itu disebabkan beberapa alasan, *pertama*, figur yang tidak merakyat. Diduga caleg perempuan PDIP kurang dikenal warga Kota Ambon, padahal popularitas merupakan salah satu modal sosial (social capital) yang harus dimiliki caleg untuk lolos dan mendapatkan kursi di DPRD. Kurangnya pendekatan yang dilakukan menyebabkan caleg perempuan tidak dikenal warga Kota Ambon, melainkan hanya dikenal di dalam organisasi-organisasi tertentu, jaringan keluarga (suku, marga, dan asal daerah), dan almamater yang sama (Purwaningsih et al., 2022).

Kedua, track record. Warga masyarakat akan memilih caleg dengan rekam jejak yang baik. Diprediksi bahwa track record yang dimiliki caleg perempuan PDIP dinilai kurang menarik, karena pengalaman di dunia politik yang sangat minim, tidak memiliki jabatan strategis dalam organisasi-organisasi besar, latar belakang pendidikan yang dinilai kurang tinggi, serta adanya isu-isu negatif yang tersebar di tengah-tengah warga masyarakat tentang caleg perempuan (Alex et al., 2023).

Ketiga, finansial. Modal ekonomi merupakan satu faktor terpenting dalam memenangkan kursi legislatif. Setiap caleg perempuan yang maju pada pemilu harus mengeluarkan dana yang besar untuk keperluan semasa kampanye, seperti dana untuk mencetak spanduk dan baliho, dana untuk cetak kartu nama, baju, dan juga membayar para relawan (Afdhal & Hidayat, 2019). Besarnya modal yang harus disiapkan membuat caleg Perempuan merasa kesulitan, sehingga proses kampanye dan kegiatan-kegiatan lainnya berjalan kurang maksimal (Aspinall, 2014).

Berdasarkan penjelasan dan gejala yang diulas dalam latar belakang tersebut, menjadi

alasan memilih kajian ini, dengan judul : “Politik dan Perempuan: Kajian Kegagalan Caleg Perempuan Partai PDIP Pada Pemilu Legislatif Kota Ambon Tahun 2019.

## **METODE PENELITIAN (Heading 1)**

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode penelitian eksplanatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena kegagalan calon legislatif perempuan dari PDIP dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Ambon tahun 2019. Metode penelitian eksplanatif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan tersebut (Creswell & Poth, 2016).

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk wawancara dengan calon legislatif perempuan, anggota PDIP, dan pemilih; analisis dokumen partai, seperti program rekrutmen dan kaderisasi; serta observasi terhadap aktivitas kampanye dan dinamika politik selama Pemilihan Umum Legislatif. Partisipan utama penelitian ini adalah calon legislatif perempuan dari PDIP, anggota partai, dan pemilih yang terlibat dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota Ambon tahun 2019. Pemilihan partisipan dilakukan secara purposif untuk memastikan variasi dalam pandangan dan pengalaman. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-struktural dengan partisipan yang relevan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang dirancang sebelumnya. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk memeriksa kebijakan dan program rekrutmen serta kaderisasi partai.

Data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen dianalisis menggunakan metode analisis konten. Data yang terkumpul akan dikategorikan, dianalisis, dan dikaitkan dengan temuan utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan calon legislatif perempuan.

Keabsahan data akan dijaga melalui triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen dan observasi. Selain itu, interkonsistensi antara peneliti akan digunakan untuk meminimalkan bias penelitian. Penelitian ini akan mematuhi semua etika penelitian, termasuk pengungkapan tujuan penelitian kepada partisipan, menjaga kerahasiaan data, dan mendapatkan izin atau persetujuan dari partisipan yang relevan. Metode penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan calon legislatif perempuan dari PDIP pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Ambon tahun 2019..

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Rekrutmen Partai dan Kaderisasi Partai**

Rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik adalah salah satu tahap penting dalam mempersiapkan kader yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin nasional. Untuk mencapai tujuan ini, partai politik harus memiliki proses rekrutmen dan kaderisasi yang baik serta tahapan yang terstruktur (Zahra et al., 2022). Dalam konteks ini, wawancara dengan Bapak Wenly Thenu,

yang menjabat sebagai Sekretaris DPC PDIP Kota Ambon pada 24 Februari 2023, memberikan wawasan yang berharga. Beliau menjelaskan, "Jadi untuk rekrutmen tahun 2019, PDIP mengacu pada Peraturan Partai (PP) No. 25 A tahun 2018 tentang rekrutmen dan seleksi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nah, dalam peraturan tersebut, diberikan ruang yang sangat luas kepada masyarakat, khususnya perempuan, yang ingin bergabung dengan PDI Perjuangan." Penekanan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama perempuan, dalam proses rekrutmen mencerminkan komitmen partai untuk mewujudkan inklusivitas dalam politik dan memastikan bahwa bakat-bakat potensial memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam perjalanan politik partai. Dengan demikian, proses rekrutmen yang terbuka dan inklusif seperti ini diharapkan dapat meningkatkan keragaman dan representasi gender dalam politik, yang pada gilirannya dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola yang lebih baik.

Proses rekrutmen yang adil dan inklusif adalah langkah awal yang krusial dalam membangun fondasi politik yang sehat dan beragam. Peraturan Partai No. 25 A tahun 2018 yang diacu oleh PDIP Kota Ambon menunjukkan keseriusan partai dalam menciptakan tahapan yang terstruktur dan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga, khususnya perempuan, untuk terlibat dalam politik. Ini merupakan langkah yang positif dalam mengatasi tantangan ketidaksetaraan gender dalam dunia politik (Graham Davies, 2005; Langohr, 2001).

Namun, keberhasilan rekrutmen juga tergantung pada pelaksanaan dan penerapan peraturan tersebut. Partai politik harus bekerja secara aktif untuk mendorong partisipasi perempuan dan mengidentifikasi potensi kepemimpinan dalam rangka memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih signifikan dalam politik. Selain itu, pendidikan politik dan dukungan aktif dari partai dapat membantu perempuan merasa lebih percaya diri dan siap untuk terlibat dalam proses politik. Selanjutnya, penting untuk mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan rekrutmen secara berkala untuk memastikan bahwa prinsip kesetaraan gender benar-benar terwujud dalam praktek. Langkah-langkah ini akan membantu memastikan bahwa perempuan memiliki peran yang lebih kuat dalam politik lokal dan nasional, serta memungkinkan masyarakat untuk lebih meresapi manfaat dari representasi gender yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan politik.

Pandangan Bapak Danny Lawalata, yang menjabat sebagai Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Kota Ambon pada 10 April 2023, memberikan perspektif yang lebih jelas tentang pentingnya mengikuti aturan partai dan ketentuan Undang-Undang Pemilu dalam proses rekrutmen. Beliau menegaskan, "Tetap mengacu pada aturan partai. Yang paling prinsip dari rekrutmen adalah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, yakni kuota perempuan 30% karena itu paling penting."

Pernyataan ini menyoroti pentingnya mematuhi peraturan dan undang-undang yang mengatur kuota perempuan dalam politik. Dengan mengalokasikan setidaknya 30% kursi untuk perempuan, perundang-undangan bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan mengatasi ketidakseimbangan gender. Namun, mematuhi aturan ini tidak hanya sebatas pada kertas, tetapi juga melibatkan upaya nyata untuk memastikan bahwa perempuan

memiliki kesempatan untuk mendaftar dan terlibat dalam proses politik.

Dalam hal ini, Bapak Danny Lawalata menekankan pentingnya menyebarkan pengumuman pendaftaran caleg ke semua kecamatan dan memastikan bahwa potensi kandidat perempuan diakui dan didorong untuk mendaftar. Dengan cara ini, proses rekrutmen dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, memungkinkan perempuan untuk berperan aktif dalam politik, dan memenuhi persyaratan undang-undang sekaligus mendukung tujuan kesetaraan gender dalam pengambilan keputusan politik.

Melalui pandangan Bapak Danny Lawalata sebagai Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Kota Ambon pada 10 April 2023, terungkap pentingnya mematuhi aturan partai dan ketentuan Undang-Undang Pemilu, khususnya dalam hal kuota perempuan sebesar 30%. Pemahaman bahwa kuota perempuan adalah prinsip yang sangat penting dalam rekrutmen mencerminkan komitmen untuk mencapai representasi gender yang lebih seimbang dalam politik.

Penerapan kuota perempuan sebesar 30% adalah salah satu langkah strategis dalam mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik. Ini mendorong partai politik untuk secara aktif mencari, mendukung, dan mengakui potensi perempuan sebagai calon legislatif. Namun, penting untuk tidak hanya membatasinya pada angka-angka tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif perempuan.

Pengumuman pendaftaran caleg yang disebar ke semua kecamatan adalah langkah kunci dalam memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mendaftar dan terlibat dalam proses politik. Hal ini menciptakan kesempatan bagi perempuan dari berbagai latar belakang dan wilayah untuk ikut serta dalam politik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keragaman pandangan dan pengalaman yang mereka bawa ke dalam pembuatan keputusan politik.

Dengan demikian, pandangan Bapak Danny Lawalata menyoroti betapa pentingnya mematuhi aturan partai dan undang-undang terkait kuota perempuan dalam rekrutmen caleg. Ini bukan hanya tentang memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang inklusif dan adil bagi perempuan yang ingin terlibat dalam politik, sehingga mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Hasil dari wawancara ini mengungkapkan bahwa proses rekrutmen calon legislatif (caleg) dari PDIP Perempuan untuk empat Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Ambon berlangsung sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan peraturan partai politik. Hal ini menunjukkan keseriusan PDIP dalam mematuhi hukum dan prinsip-prinsip demokratis dalam menjalankan proses rekrutmen.

Meskipun demikian, ada pengakuan yang jujur bahwa meskipun proses rekrutmen telah berjalan sesuai dengan ketentuan, target kuota 30% keterwakilan perempuan dalam caleg belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik. Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh banyak partai politik dalam mencapai tujuan kesetaraan gender dalam politik. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mencari calon perempuan yang berkualifikasi, tetap ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk

meningkatkan jumlah dan peran perempuan dalam dunia politik.

Dalam konteks ini, penting bagi partai politik dan masyarakat secara keseluruhan untuk terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Hal ini dapat mencakup upaya lebih aktif untuk mencari dan mendukung calon perempuan yang berkualifikasi, memberikan pelatihan dan dukungan yang dibutuhkan, serta menciptakan lingkungan yang inklusif yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bahwa perwakilan perempuan dalam politik akan meningkat, memperkuat keragaman pandangan, dan mempromosikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan adil.

### **Kepemimpinan Politik Kaum Perempuan**

Kepemimpinan dan jabatan yang dipegang oleh seseorang adalah refleksi dari wibawa, tanggung jawab, dan kerja keras yang mereka tunjukkan selama masa jabatan mereka. Apabila jabatan tersebut diperoleh melalui usaha dan perjuangan yang dimulai dari posisi yang lebih rendah, maka nilainya menjadi lebih berharga. Pendapat ini diperkuat oleh wawancara dengan Ibu Ira Nikijuluw, yang menjalani peran sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Ambon dan juga merupakan caleg perempuan dari PDIP pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Ambon tahun 2019, yang dilakukan pada 24 Februari 2023.

Ibu Ira Nikijuluw mencerminkan contoh pemimpin yang memiliki keterlibatan aktif dalam organisasi sosial, khususnya Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Perannya dalam LSM ini bukan hanya sebagai anggota, melainkan juga sebagai penanggung jawab. Hal ini menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap peran sosialnya dan pekerjaan yang dilakukan dalam jabatannya. Selain itu, pengalaman kerja kerasnya dalam posisi manajerial sebagai manajer LSM yang dimiliki oleh mertuanya menyoroti keberhasilannya dalam membangun kredibilitas dan otoritas dalam bidang sosial.

Dari wawancara ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang mendapatkan jabatan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mengelola tanggung jawab dan memainkan peran penting dalam bidangnya. Ibu Ira Nikijuluw adalah contoh yang mengilhami bahwa kesuksesan dalam kepemimpinan dapat diperoleh melalui kerja keras, dedikasi, dan keterlibatan aktif dalam berbagai inisiatif sosial. Keberhasilannya adalah bukti bahwa kepemimpinan yang diraih melalui perjuangan bawahannya memiliki nilai yang besar dan mempengaruhi positif dalam berbagai sektor masyarakat.

Kepemimpinan dan jabatan adalah dua unsur penting yang sering mencerminkan karakter, kapabilitas, dan dedikasi individu selama masa jabatan mereka. Lebih dari sekadar posisi, kepemimpinan adalah tentang kemampuan seseorang untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain, sambil menanggung tanggung jawab yang berkaitan dengan tugas dan kewenangannya.

Wawancara dengan Ibu Ira Nikijuluw, yang menjabat sebagai Bendahara DPC PDIP Kota Ambon dan juga merupakan caleg perempuan PDIP dalam Pemilihan Umum Legislatif Kota



Ambon tahun 2019 pada 24 Februari 2023, mengungkapkan bagaimana seorang pemimpin dapat memiliki dampak yang signifikan dalam sektor sosial. Perannya dalam Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) adalah bukti nyata bagaimana kepemimpinan dapat digunakan untuk berperan aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

Penting untuk diingat bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang memegang jabatan tertentu, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memanfaatkan posisinya untuk melayani dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kesuksesan Ibu Ira Nikijuluw dalam menjalankan peran sosialnya menunjukkan bahwa tanggung jawab dan kerja keras selama masa jabatan adalah kunci keberhasilan seorang pemimpin. Dengan demikian, pengalaman dan pandangan dari wawancara ini menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan yang berfokus pada pelayanan masyarakat dan dedikasi untuk menciptakan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Meskipun ada kegagalan dalam terpilihnya beberapa caleg perempuan dari PDIP, perspektif yang berbeda disampaikan oleh Bapak Danny Lawalata, yang menjabat sebagai Kepala Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDIP Kota Ambon pada tahun 2019, dalam wawancara yang dilakukan pada 10 April 2023. Bapak Danny Lawalata menyoroti bahwa menggambarkan caleg perempuan PDIP sebagai kalah atau gagal mungkin tidak sepenuhnya tepat, terutama ketika mempertimbangkan faktor sistem konversi Sainte Lague yang digunakan dalam pemilihan.

Beliau menjelaskan bahwa, meskipun beberapa caleg perempuan dari PDIP tidak terpilih, mereka masih berhasil mengumpulkan sejumlah besar suara. Sebagai contoh, dalam Daerah Pemilihan (Dapil) 3, ada seorang caleg perempuan yang berhasil meraih lebih dari 900 suara. Poin yang ditekankan adalah bahwa keterlibatan aktif caleg perempuan dari PDIP dalam proses pemilihan menghasilkan perolehan suara yang signifikan, menunjukkan bahwa mereka memiliki dukungan masyarakat yang kuat.

Bapak Danny Lawalata juga menyoroti bahwa dalam beberapa kasus, caleg laki-laki, yang merupakan incumbent atau anggota incumben, memiliki keunggulan dalam jumlah suara yang lebih besar. Ini adalah situasi yang umum terjadi dalam politik, di mana caleg yang telah memiliki nama dan pengalaman dalam jabatan sebelumnya memiliki keunggulan dalam perolehan suara. Pandangan ini memberikan sudut pandang yang lebih optimis terhadap keberhasilan caleg perempuan dari PDIP dalam pemilihan. Meskipun mereka tidak terpilih, kontribusi mereka dalam mengumpulkan suara dan berpartisipasi aktif dalam proses politik tetap patut dihargai. Ini juga menunjukkan pentingnya mendukung lebih banyak perempuan untuk terlibat dalam politik, sehingga mewujudkan representasi gender yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan politik.

Hasil dari wawancara ini memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kegagalan caleg perempuan dari PDIP dalam meraih kursi di DPRD Kota Ambon berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2019. Keberhasilan dalam mengumpulkan suara yang cukup baik pada dasarnya menunjukkan bahwa caleg perempuan PDIP memiliki dukungan masyarakat yang signifikan dan kualifikasi yang memadai untuk mewakili wilayah tersebut. Namun, kegagalan mereka untuk



mendapatkan kursi dalam DPRD Kota Ambon disebabkan oleh sistem konversi suara Sainte Lague yang digunakan dalam pemilihan.

Sistem konversi suara Sainte Lague adalah salah satu metode yang digunakan untuk menghitung kursi dalam sistem pemilihan proporsional. Sistem ini memperhitungkan jumlah suara yang diperoleh oleh masing-masing caleg dan kemudian membaginya dengan faktor-faktor tertentu untuk menentukan siapa yang mendapatkan kursi. Dalam banyak kasus, caleg laki-laki seringkali memiliki perolehan suara yang lebih tinggi daripada caleg perempuan, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor sosial dan budaya yang memengaruhi preferensi pemilih.

Karena caleg laki-laki umumnya memiliki perolehan suara yang lebih tinggi, mereka lebih cenderung mendominasi perolehan kursi dalam sistem konversi suara Sainte Lague. Ini bukanlah masalah spesifik bagi PDIP atau perempuan caleg mereka, tetapi merupakan tantangan umum dalam sistem pemilihan proporsional yang menggunakan metode semacam itu.

Dengan demikian, meskipun caleg perempuan PDIP memiliki dukungan suara yang cukup baik, mereka mungkin tetap kalah dalam perolehan kursi karena persaingan yang kuat dengan caleg laki-laki. Hal ini menunjukkan perlunya terus mendorong kesetaraan gender dalam politik dan mempertimbangkan perubahan dalam sistem pemilihan jika diperlukan untuk mencapai representasi gender yang lebih seimbang dalam pengambilan keputusan politik.

### **Meranggasnya Ketokohan Figur Perempuan**

Dalam perjalanan menuju kepemimpinan, interaksi dan kerja sama antara pemimpin dan masyarakat memainkan peran yang sangat vital. Tidak hanya pemimpin yang berkontribusi pada perkembangan komunitas, tetapi juga keterlibatan dan dukungan masyarakat yang mempengaruhi sejauh mana pemimpin, terutama perempuan, dapat mencapai tujuannya dalam politik. Pada konteks pemilihan umum Kota Ambon tahun 2019, keterbukaan dan penerimaan masyarakat terhadap pemimpin perempuan menjadi elemen yang menentukan dalam kesuksesan caleg perempuan dari PDIP.

Wawancara dengan Ibu Julia Sopachua, seorang anggota masyarakat di RT 04 Kudamati, yang dilakukan pada 27 Februari 2023, memberikan pandangan penting tentang perspektif masyarakat terhadap perempuan dalam politik. Ibu Julia merujuk pada sejarah perjuangan Ibu Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita dan kesetaraan gender sebagai landasan yang mendukung hak perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan. Baginya, perempuan memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin dan berkontribusi dalam urusan publik, dan peran perempuan tidak hanya terbatas pada rumah tangga.

Pandangan Ibu Julia mencerminkan pergeseran masyarakat menuju pemahaman yang lebih inklusif dan progresif tentang peran perempuan dalam politik. Ketika masyarakat menerima gagasan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan hak yang sama untuk memimpin, maka peluang caleg perempuan untuk terpilih menjadi lebih besar. Oleh karena itu, dukungan aktif dari masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Julia, adalah salah satu pilar utama dalam

memajukan peran perempuan dalam politik dan memastikan bahwa suara mereka diperhitungkan dalam pengambilan keputusan yang krusial. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesetaraan gender dan terus memberikan edukasi serta kesadaran tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, kita dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat merasa terlibat dan mampu menciptakan perubahan positif dalam tatanan politik dan sosial.

Dalam perjalanan menuju kepemimpinan dan perwakilan politik yang lebih inklusif, peran masyarakat sangat penting. Keterlibatan dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat memainkan peran utama dalam menentukan kesuksesan para caleg perempuan, terutama yang berasal dari PDIP, dalam pemilihan umum Kota Ambon tahun 2019. Keterbukaan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin dan pengambil keputusan memengaruhi apakah caleg perempuan tersebut terpilih atau tidak.

Melalui wawancara dengan Ibu Julia Sopachua, seorang anggota masyarakat di RT 04 Kudamati, yang dilakukan pada 27 Februari 2023, tergambar keyakinan kuat akan hak-hak perempuan untuk berpartisipasi dalam politik dan kepemimpinan. Ibu Julia merujuk pada sejarah perjuangan Ibu Kartini, yang menjadi simbol emansipasi wanita dan perjuangan untuk kesetaraan gender. Baginya, perempuan memiliki hak yang sama untuk memimpin dan berperan aktif dalam masyarakat, dan peran mereka tidak terbatas pada urusan rumah tangga.

Pendapat Ibu Julia menunjukkan adanya perubahan budaya dan sikap masyarakat yang lebih terbuka terhadap peran perempuan dalam politik. Ketika masyarakat menerima gagasan bahwa perempuan memiliki kapabilitas yang sama untuk memimpin dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan, maka peluang caleg perempuan untuk terpilih menjadi lebih besar. Dukungan aktif dari masyarakat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Julia, adalah salah satu elemen penting dalam memperkuat peran perempuan dalam politik dan memastikan bahwa pandangan dan aspirasi mereka dihargai dalam tatanan politik yang lebih inklusif.

Penting untuk terus mempromosikan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik dan kepemimpinan. Dengan terus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran perempuan dalam pembangunan masyarakat dan negara, kita dapat memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik yang akan membentuk masa depan yang lebih adil dan beragam.

Pentingnya ketokohan dan popularitas seorang calon legislatif (caleg) tidak bisa diabaikan dalam sebuah konteks pemilihan umum. Bagaimana masyarakat melihat dan mengenal seorang caleg dapat memiliki dampak signifikan pada hasil pemilihan. Untuk mengukur tingkat ketokohan figur caleg perempuan dari PDIP di Kota Ambon, kita dapat merujuk pada wawancara dengan Bapak Bambe Heuat, yang menjabat sebagai Ketua RT 04 Kudamati, yang dilakukan pada 27 Februari 2023.

Pendapat Bapak Bambe Heuat mencerminkan pentingnya popularitas dalam politik. Beliau menegaskan bahwa seorang caleg harus memiliki tingkat popularitas yang signifikan untuk berhasil dalam pemilihan. Ini karena popularitas adalah salah satu faktor yang memengaruhi

persepsi dan dukungan masyarakat terhadap seorang calon.

Namun, Bapak Bambe Heuat juga mengakui bahwa dalam pemilihan umum Kota Ambon tahun 2019, popularitas caleg perempuan dari PDIP mungkin tidak sebanding dengan caleg dari partai lain. Hal ini mengindikasikan tantangan yang dihadapi oleh caleg perempuan dari PDIP dalam membangun ketokohan dan popularitas mereka, terutama dalam lingkungan politik yang kompetitif.

Hasil dari wawancara ini memberikan pemahaman bahwa popularitas adalah salah satu faktor penting dalam politik yang dapat memengaruhi keberhasilan seorang caleg. Namun, untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik, tidak hanya popularitas yang harus diperhatikan, tetapi juga dukungan dan upaya untuk membangun citra yang kuat dan kualifikasi yang memadai. Dengan demikian, peningkatan ketokohan dan popularitas perempuan dalam politik harus menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong partisipasi perempuan yang lebih besar dalam proses demokratis.

Hasil dari wawancara dengan berbagai pihak memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan caleg perempuan dari PDIP dalam meraih kursi di DPRD Kota Ambon pada Pemilihan Umum 2019. Salah satu faktor penting yang memengaruhi hasil ini adalah tingkat ketokohan atau tingkat pengenalan caleg perempuan tersebut di mata masyarakat Kota Ambon.

Dalam konteks politik, ketokohan adalah salah satu aspek penting yang dapat memengaruhi keberhasilan seorang caleg dalam mendapatkan dukungan pemilih. Seorang caleg yang dikenal oleh masyarakat umumnya memiliki keunggulan dalam meraih suara dalam pemilihan umum. Namun, dari hasil wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa rata-rata caleg perempuan dari PDIP belum cukup dikenal oleh warga Kota Ambon.

Ketidakkennen ini dapat menjadi hambatan serius dalam proses pemilihan. Masyarakat yang tidak mengenal seorang caleg mungkin cenderung memilih caleg yang sudah dikenal atau yang memiliki popularitas lebih tinggi. Oleh karena itu, faktor ketokohan yang rendah dapat menjadi salah satu alasan mengapa caleg perempuan dari PDIP mengalami kegagalan dalam meraih kursi di DPRD Kota Ambon.

Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah untuk membangun ketokohan dan meningkatkan visibilitas caleg perempuan dalam masyarakat perlu dipertimbangkan. Ini dapat melibatkan kampanye yang lebih intensif, kehadiran aktif dalam komunitas, partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, dan upaya lainnya untuk memperkenalkan diri kepada pemilih potensial. Selain itu, partai politik juga dapat memainkan peran penting dalam membantu membangun ketokohan dan mendukung caleg perempuan untuk sukses dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, ketokohan dan tingkat pengenalan caleg perempuan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan perempuan dalam politik. Dengan upaya yang tepat, perempuan dapat memperoleh dukungan yang pantas mereka terima dan memainkan peran yang lebih besar dalam pengambilan keputusan politik.

## **Rendahnya Basis Sosial Perempuan**

Basis sosial adalah salah satu faktor yang menjadi pertimbangan penting bagi DPC PDIP Kota Ambon dalam melakukan proses rekrutmen calon legislatif (caleg). Hal ini disebabkan oleh pemahaman bahwa basis sosial yang dimiliki oleh seorang caleg akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap preferensi dan pilihan masyarakat dalam Pemilihan Umum. Hasil wawancara dengan Ibu Julia Sopachua, seorang anggota masyarakat di RT 04 Kudamati pada 27 Februari 2023, mengungkapkan pentingnya faktor ini dalam konteks pemilihan umum.

Ibu Julia Sopachua memberikan perspektif yang jelas tentang bagaimana entitas sosial, seperti daerah asal caleg, dapat memengaruhi preferensi pemilih. Pengalaman pribadinya dalam pemilihan umum sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat seringkali lebih cenderung mendukung caleg yang memiliki afiliasi atau kedekatan dengan entitas sosial tertentu, seperti daerah asal atau lingkungan yang sama. Ini bisa disebabkan oleh rasa familiaritas dan kepercayaan yang terbangun dalam entitas sosial tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa selain kualifikasi dan visi caleg, faktor basis sosial juga memegang peranan penting dalam proses pemilihan. Caleg yang memiliki konektivitas dan relasi yang kuat dalam entitas sosial tertentu mungkin memiliki keunggulan dalam meraih dukungan pemilih dari entitas tersebut. Dalam konteks politik, pemahaman tentang faktor basis sosial ini menjadi penting baik bagi caleg maupun partai politik. Caleg dapat memanfaatkan hubungan dan koneksi yang dimilikinya dalam membangun dukungan masyarakat dari berbagai entitas sosial. Sementara itu, partai politik dapat mempertimbangkan diversifikasi calon mereka untuk mencakup beragam entitas sosial, sehingga dapat menciptakan representasi yang lebih inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, basis sosial adalah faktor yang tidak boleh diabaikan dalam politik, dan pemahaman tentang peranannya dapat membantu memahami dinamika pemilihan umum dan representasi politik yang lebih baik.

Basis sosial, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Julia Sopachua dalam wawancara yang dilakukan pada 27 Februari 2023, memiliki dampak yang kuat dalam proses pemilihan umum. Pemahaman ini menggambarkan bagaimana faktor-faktor seperti daerah asal caleg dan hubungan personal dengan pemilih dapat memengaruhi preferensi pemilih.

Pentingnya basis sosial dalam politik adalah bagian dari dinamika yang lebih luas dalam pemilihan umum. Masyarakat seringkali cenderung mendukung caleg yang memiliki ikatan sosial atau keakraban dengannya. Ini bisa terjadi karena orang cenderung merasa lebih nyaman dan percaya kepada seseorang yang mereka kenal atau yang memiliki kedekatan sosial dengan mereka. Namun, penting untuk mencatat bahwa sementara basis sosial dapat memengaruhi pilihan pemilih, ini tidak boleh digunakan sebagai satu-satunya kriteria dalam pemilihan caleg. Kualifikasi, visi, komitmen, dan rencana kerja caleg juga harus dipertimbangkan dengan serius. Dalam praktiknya, kombinasi antara basis sosial yang kuat dan kualifikasi yang baik dapat menjadi faktor penentu keberhasilan caleg dalam pemilihan umum.

Untuk para caleg dan partai politik, pemahaman tentang peran basis sosial dapat menjadi

strategi penting dalam membangun dukungan masyarakat. Ini berarti membangun hubungan yang baik dengan berbagai entitas sosial dan berusaha memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang beragam. Selain itu, pendidikan pemilih juga dapat memainkan peran penting dalam mengatasi bias basis sosial. Pendidikan pemilih dapat membantu pemilih untuk lebih memahami pentingnya memilih berdasarkan kualifikasi dan visi caleg daripada hanya mempertimbangkan faktor-faktor sosial.

Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Bambe Heuat, yang merupakan Ketua RT 04 Kudamati, dalam wawancara yang dilakukan pada 27 Februari 2023, menggarisbawahi pentingnya hubungan sosial dan koneksi dalam politik. Beliau menunjukkan bahwa memiliki saudara atau kenalan yang menjadi anggota DPRD adalah faktor yang dapat memengaruhi preferensi pemilih dalam pemilihan umum. Pernyataan ini mengilustrasikan bagaimana faktor hubungan sosial dan afiliasi regional dapat memainkan peran dalam politik lokal.

Dalam politik lokal, hubungan pribadi, seperti memiliki saudara atau kenalan yang terlibat dalam politik, dapat menciptakan rasa kepemilikan dan harapan dalam masyarakat. Pemilih seringkali memiliki harapan bahwa pemilihan caleg dari daerah mereka akan membawa manfaat dan perhatian lebih besar untuk daerah mereka sendiri. Ini adalah aspek penting dalam politik lokal, di mana pemilih ingin melihat perwakilan mereka yang terpilih berkomitmen untuk memajukan kepentingan daerah mereka.

Namun, penting untuk mencatat bahwa sementara hubungan sosial dapat memengaruhi pemilihan, ini juga harus dibarengi dengan evaluasi yang cermat terhadap kualifikasi dan komitmen caleg. Pemilih perlu memastikan bahwa caleg yang mereka pilih benar-benar dapat mewakili kepentingan masyarakat dan berkomitmen untuk bekerja demi kemajuan daerah.

Dalam politik yang lebih luas, pemahaman tentang bagaimana hubungan sosial dan afiliasi regional memengaruhi pemilihan dapat membantu caleg dan partai politik dalam merancang strategi kampanye yang efektif. Hal ini melibatkan membangun koneksi dan memperkuat hubungan dengan masyarakat dalam skala yang lebih luas, serta menawarkan visi dan rencana kerja yang sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Dengan demikian, pernyataan Bapak Bambe Heuat memperlihatkan bahwa hubungan sosial dan afiliasi regional memainkan peran penting dalam politik lokal, dan pemahaman tentang faktor ini dapat membantu pemahaman yang lebih baik tentang dinamika pemilihan umum di tingkat komunitas.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak telah membuka jendela ke dalam faktor-faktor yang memengaruhi kegagalan caleg perempuan dari PDIP untuk memperoleh kursi di DPRD Kota Ambon dalam Pemilihan Umum 2019. Selain faktor-faktor seperti ketokohan dan dukungan masyarakat yang telah dibahas sebelumnya, basis sosial dan rekam jejak politik yang rendah juga merupakan faktor yang berperan dalam kegagalan tersebut.

Basis sosial, yang merujuk pada jaringan dan koneksi sosial yang dimiliki oleh seorang caleg, memiliki pengaruh signifikan dalam politik. Dalam konteks Pemilihan Umum, koneksi yang kuat dengan berbagai kelompok masyarakat, organisasi, atau komunitas dapat membantu seorang caleg untuk membangun dukungan yang lebih besar. Namun, jika caleg perempuan dari

PDIP memiliki basis sosial yang tergolong rendah atau terbatas, maka hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya mereka untuk meraih dukungan yang cukup untuk terpilih. Selain basis sosial yang terbatas, rekam jejak politik yang minim juga dapat menjadi faktor penghambat. Rekam jejak politik mencerminkan pengalaman dan keterlibatan seorang caleg dalam politik sebelumnya. Caleg yang memiliki pengalaman politik yang kuat dan telah terlibat dalam berbagai kegiatan politik mungkin memiliki keunggulan dalam memahami dinamika politik lokal, membangun relasi, dan mengkomunikasikan visi dan rencana mereka kepada pemilih.

Namun, jika caleg perempuan dari PDIP memiliki rekam jejak politik yang sangat minim, maka mereka mungkin kurang memiliki keunggulan dalam hal tersebut. Ini dapat mempengaruhi persepsi pemilih tentang kualifikasi dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPRD. Dalam mengatasi tantangan ini, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan basis sosial melalui partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas dan organisasi, serta meningkatkan keterlibatan dalam politik lokal. Selain itu, pendidikan politik dan pelatihan politik dapat membantu caleg perempuan untuk memahami proses politik dan membangun kualifikasi yang diperlukan.

Kegagalan caleg perempuan dari PDIP dalam Pemilihan Umum 2019 di Kota Ambon dapat diatribusikan pada sejumlah faktor, termasuk basis sosial yang terbatas dan rekam jejak politik yang minim. Untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik, langkah-langkah untuk memperkuat basis sosial dan membangun rekam jejak politik yang lebih kuat perlu menjadi perhatian utama dalam upaya rekrutmen dan persiapan calon perempuan di masa depan.

## **SIMPULAN**

Kesimpulan dari analisis faktor-faktor kegagalan caleg perempuan dari PDIP dalam Pemilihan Umum 2019 di Kota Ambon mencakup beberapa aspek penting. Faktor-faktor yang telah dibahas, seperti rekrutmen dan kaderisasi partai, kepemimpinan politik kaum perempuan, faktor ketokohan figur perempuan, serta basis sosial yang rendah, semuanya berperan dalam menentukan hasil pemilihan. Salah satu temuan penting adalah bahwa masih kurangnya pemahaman mengenai kesetaraan gender di tengah masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya perolehan suara caleg perempuan. Ini mencerminkan tantangan dalam mempromosikan kesetaraan gender dalam politik dan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, diterapkannya sistem konversi suara Sainte Lague juga berkontribusi terhadap ketidakterpilihan caleg perempuan, mengingat perolehan suara mereka relatif kecil dibandingkan dengan caleg laki-laki incumben yang lebih dikenal. Faktor lain yang berperan adalah basis sosial yang tergolong rendah dan rekam jejak politik yang minim yang dimiliki oleh caleg perempuan dari PDIP. Hal ini mencerminkan perlunya upaya yang lebih besar dalam membangun hubungan sosial yang kuat dan meningkatkan keterlibatan dalam politik lokal. Kesimpulannya, kegagalan caleg perempuan dari PDIP dalam Pemilihan Umum 2019 di Kota Ambon adalah hasil dari sejumlah faktor yang saling terkait. Untuk memastikan peran yang lebih kuat bagi perempuan dalam

politik, langkah-langkah untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender, memperkuat basis sosial, dan membangun rekam jejak politik yang lebih kuat perlu menjadi fokus utama. Dengan demikian, politik dapat menjadi lebih inklusif dan mencerminkan aspirasi dan representasi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., & Hidayat, R. (2019). Perlawanan Gerakan Guru Pasca Orde Baru di Indonesia: Studi Pada Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 1(1), 1–16.
- Alex, A., Nasiwan, N., Abdillah, A., & Haris, M. (2023). Women in local politics: Insights from Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia Perempuan dalam politik lokal: Wawasan dari Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 36(1), 126–140.
- Amus, S., Jamaludin, J., & Hasdin, H. (2022). Studi Budaya Politik Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Politik Kewarganegaraan. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(1), 64–70.
- Aspinall, E. (2014). When brokers betray: Clientelism, social networks, and electoral politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570.
- Bantarani, A. (2019). *Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Pada Pemilu Presiden Tahun 2019 (Study Perbandingan terhadap Jama'ah Pengajian Aisyiyah Kecamatan Jetis dan Jama'ah Pengajian Muslimat Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo)*. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- Dodanwala, T. C., & Shrestha, P. (2021). Work–family conflict and job satisfaction among construction professionals: the mediating role of emotional exhaustion. *On the Horizon: The International Journal of Learning Futures*, 29(2), 62–75.
- Erdayani, R., Afandi, S. A., Afandi, M., Aswad, H., & Afandi, N. H. (2022). Political Competition in Riau: A Review of Critical Discourse Analysis. *Jurnal El-Riyasah*, 13(1), 92–197.
- Graham Davies, S. (2005). Women in politics in Indonesia in the decade post-Beijing. *International Social Science Journal*, 57(184), 231–242.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74–85.
- Jama, S. R., Wiyono, S., & Hady, N. (2021). Perilaku Pemilih Warga Desa Golongan Muda dan Golongan Tua dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 290–301.
- Kiftiyah, A. (2019). Perempuan dalam partisipasi politik di Indonesia. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 14(1), 1–13.
- Langohr, V. (2001). Of Islamists and ballot boxes: Rethinking the relationship between Islamisms and electoral politics. *International Journal of Middle East Studies*, 33(4), 591–610.
- Mayrudin, Y. M., Nurrohman, B., & Astuti, D. S. (2022). Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-partai Politik. *Ijd-Demos*, 4(3).
- Priandi, R., & Roisah, K. (2019). Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam



- pemilihan umum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 106–116.
- Purwaningsih, T., Rochimah, T. H. N., Sutan, A. J., & Kurniawan, D. (2022). Women's Issues in the Campaign of Incumbent's Wife in the Regional Head Election. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 162–178.
- Purwanto, A. (2020). The effect of work-family conflict on job satisfaction and performance: a study of Indonesian female employees. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(03), 6724–6748.
- Purwanto, A., Asbari, M., Fahlevi, M., Mufid, A., Agistiawati, E., Cahyono, Y., & Suryani, P. (2020). Impact of work from home (WFH) on Indonesian teachers performance during the Covid-19 pandemic: An exploratory study. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 6235–6244.
- Wahyudi, V. (2018). Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63–83.
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi politik perempuan perspektif hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 6(1), 1–27.
- Zahra, F. F. Z. F. F., Rakhmat, R. H., & Afdhal. (2022). Mencairnya Identitas Mahasiswa Melalui Second Account di Instagram. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 508–526.